

**TINJAUAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH
TERHADAP IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG
NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILU
TERKAIT KRITERIA KUOTA PEREMPUAN DALAM
ANGGOTA LEGISLATIF**
(Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung)

Skripsi

Di Ajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

Ovi Azizah
NPM. 1721020075

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syariah*)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2021 M**

**TINJAUAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH
TERHADAP IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG
NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILU
TERKAIT KRITERIA KUOTA PEREMPUAN DALAM
ANGGOTA LEGISLATIF**
(Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung)

Skripsi

Di Ajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

Ovi Azizah
NPM. 1721020075

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syariah*)

Pembimbing I : Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H.
Pembimbing II : Hervin Yoki Pradikta, M.H.I.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2021 M**

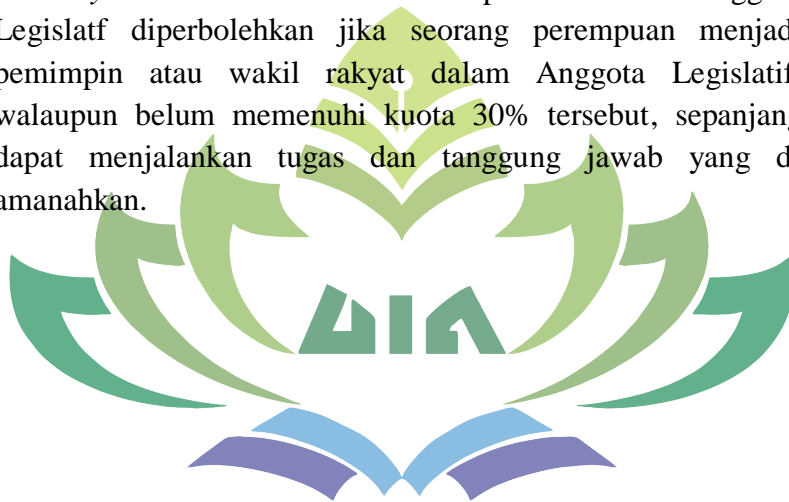
ABSTRAK

Tahun 2008 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif yaitu pada Pasal 15 huruf (d) yaitu menyertakan sekurang kurangnya 30% (tiga puluh perseratus). keterlibatan perempuan dalam jabatan politik masih selalu menjadi sebuah objek pembicaraan, khususnya pada pemilu tahun 2019 keterwakilan perempuan dalam anggota legislatif masih kurang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Terkait Kriteria Kuota Perempuan Dalam Anggota Legislatif Di KPU Kota Bandar Lampung dan bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Terkait Kriteria Kuota Perempuan Dalam Anggota Legislatif Di KPU Kota Bandar Lampung.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Terkait Kriteria Kuota Perempuan Dalam Anggota Legislatif Di KPU Kota Bandar Lampung dan Untuk meneliti Tinjauan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Terkait Kriteria Kuota Perempuan Dalam Anggota Legislatif di KPU Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian, lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Metode analisis data yang di gunakan

yaitu secara kualitatif. Dalam hal ini berkenaan dengan tinjauan *fiqh siyasah dusturiyah* terhadap Implementasi Terkait Kriteria Kuota 30% Perempuan Dalam Anggota Legislatif.

Adapun hasil penelitian ini Bahwa Implementasi Terkait Kriteria Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Dalam Anggota Legislatif Di KPU Kota Bandar Lampung dalam pemilu DPRD Tahun 2019 ketika masa pencalonan anggota legislative dari 16 partai politik terdapat 3 partai politik yang tidak memenuhi kuota 30%. Jika Ditinjau dari *Fiqh Siyasah Dusturiyah* Kriteria kuota Perempuan Dalam Anggota Legislatif diperbolehkan jika seorang perempuan menjadi pemimpin atau wakil rakyat dalam Anggota Legislatif, walaupun belum memenuhi kuota 30% tersebut, sepanjang dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab yang di amanahkan.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ovi Azizah

NPM : 1721020075

Program studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syaria*h)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILU TERKAIT KRITERIA KUOTA PEREMPUAN DALAM ANGGOTA LEGISLATIF (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Lampung, 29 April 2021

Bandar

Penulis,

Ovi Azizah

NPM 1721020075



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Sekretariat: Jl. Letkol Hendro Suratmin, Sukarama, Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : TINJAUAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH
TERHADAP IMPLEMENTASI UNDANG-
UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008
TENTANG PEMILU TERKAIT KRITERIA
KUOTA PEREMPUAN DALAM ANGGOTA
LEGISLATIF**

**(Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota
Bandar Lampung)**

Nama : Ovi Azizah
NPM : 1721020075
Program studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariah)
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H
NIP. 196201111994031001

Pembimbing II

Hervin Yoki Pradikta, M.H.I.
NIP.198802182018011002

Ketua Jurusan

Frenki, M.Si.
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Sekretariat: Jl. Letkol Hendro Suratmin, Sukarama, Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “ **TINJAUAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP IMLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILU TERKAIT KRITERIA KUOTA PEREMPUAN DALAM ANGGOTA LEGISLATIF (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung)** “ disusun oleh, Ovi Azizah, NPM: 1721020075, Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*), telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/tanggal:

TIM MUNAQOSYAH

Ketua : Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H. (.....)
Sekretaris : Arif Fikri., S.H.I., M.Ag. (.....)
Penguji Utama : Dr. H. Jayusman, M.Ag. (.....)
Penguji Pendamping I: Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H. (.....)
Penguji Pendamping II : Hervin Yoki Pradikta, M.H.I (.....)

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah**

Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP. 19621022199303100

MOTTO

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ
عَظِيمٌ

“Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan Dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar”

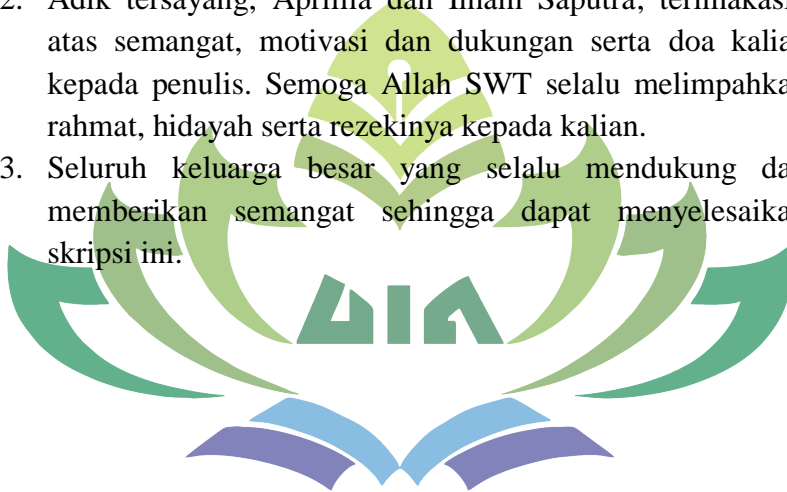
(Q.S. An-Naml [27] : 23)



PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan Yang Maha Penyayang, dengan cinta kasih Penulis persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Ayah dan Ibu tercinta, Supriono dan Sri Wahyuningsih, berkat doa restu dan semangat dari mereka berdua penulis dapat menempuh dan menyelesaikan pendidikan di bangku kuliah. Terimakasih kepada Ayah dan Ibu yang sudah berjuang sekuat tenaga demi untuk pendidikan anak yang kalian sayangi.
2. Adik tersayang, Aprillia dan Ilham Saputra, terimakasih atas semangat, motivasi dan dukungan serta doa kalian kepada penulis. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, hidayah serta rezekinya kepada kalian.
3. Seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.



Riwayat Hidup

Ovi Azizah , Lahir Pada Tanggal 11 April 2000 Di Pekon Pura Mekar, Kecamatan Gedung Surian, Kabupaten Lampung Barat. Anak Dari Pasangan Bapak Supriono Dan Ibu Sri Wahyu Nengsih.

1. Sekolah Dasar Negeri 1 Pura Mekar, Pada Tahun 2005-2011;
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Gedung Surian Pada Tahun 2011-2014;
3. Sekolah Menengah Atas 1 Sumber Jaya Pada Tahun 2014-2017;
4. Pada Tahun 2017 Penulis Melanjutkan Pendidikan Formal Di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*).

Riwayat Organisasi:

1. PMR SMPN 01 Gedung Surian Tahun 2011-2012
2. OSIS SMAN 01 Sumber Jaya Tahun 2015-2016
3. MCC Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2020

Bandar lampung, 29 April 2021

Ovi Azizah

NPM 1721020075

KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah SWT atas berkat, nikmat dan karunia-Nya yang telah memberikan penjelasan serta penerangan kepada hambanya yang tidak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir pendididkan Strata Satu (S1) dalam rangka menyelesaikan skripsi guna mendapatkan gelar sarjana yang penulis beri judul “Tinjauan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Terkait Kriteria Kuota Perempuan Dalam Anggota Legislatif (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung)”. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, Sahabat-sahabatnya, yang Inshaallah mendapat syafaat di hari akhir, aamiin.

Adapun dalam menyelesaikan Skripsi ini penulis menyadari banyak dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, dengan demikian tanpa mengurangi rasa hormat maka penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. KH. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku ketua jurusan *Siyasah Syar'iyah* Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H.,M.H. Selaku pembimbing I yang telah dengan sabar membimbing dan mengoreksi penulisan skripsi sehingga penulisan skripsi ini selesai.
5. Bapak Hervin Yoki Pradikta, M.H.I. Selaku pembimbing II yang sabar membimbing dan memberikan motivasi serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Kepada segenap Keluarga Civitas Akademika, Dosen, dan Pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
7. Bapak dan Ibu Staf Pegawai Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung dengan penuh kesabaran dan izinnya untuk proses peminjaman buku demi terselesainya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, hal itu tidak lain karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan waktu yang dimiliki. Akhirnya dengan keyakinan niat tulus ikhlas dan kerendahan hati semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk pertimbangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu syari'ah.

Bandar Lampung, 29 April 2021

Ovi Azizah

NPM 1721020075



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus Penelitian.....	7
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	9
H. Metode Penelitian	11
I. Sistematika Pembahasan	15
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Demokrasi	17
B. Pemilihan umum	29
C. Komisi Pemilihan Umum	33
D. Keterwakilan Perempuan Dalam Politik.....	35
1. Partisipasi Politik Perempuan	36

2. Kriteria kuota 30% perempuan dalam anggota legislatif	39
E. <i>Fiqh Siyasah</i>	41
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	41
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah Dusturiyah</i>	44

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran umum.....	55
1. Sejarah Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung	55
2. Visi Dan Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung	58
3. Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung	60
4. Struktural Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung	65
B. Deskripsi Data Penelitian	68
1. Pemilihan Umum Anggota legislative Kota Bandar Lampung Periode 2019-2024	68
2. Pandangan Komisioner KPU Kota Bandar Lampung Terhadap Kriteria Kuota Perempuan Dalam Anggota Legislatif	72

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Analisis Implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Kriteria Kuota Perempuan Dalam Jabatan Politik Di KPU Kota Bandar Lampung	77
B. Tinjauan <i>Fiqh Siyasah Dusturiyah</i> Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Kriteria Kuota	

Perempuan Dalam Jabatan Politik Di KPU Kota Bandar Lampung	77
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	85
B. Rekomendasi	86

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	: Struktur Organisasi KPU Kota Bandar Lampung	75
Tabel 3.2	: Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 .	78
Tabel 3.3	: Daerah Pemilihan Dan Jumlah Kursi.....	80
Tabel 3.4	: Jumlah Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Tahun 2019.....	81



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 : Logo Komisi Pemilihan Umum 66



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Izin Riset KPU Kota Bandar Lampung

Lampiran 2 : Bukti Dokumentasi Wawancara

Lampiran 3 : Surat Keterangan Wawancara

Lampiran 4: Daftar Pertanyaan Wawancara

Lampiran 5: Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi

Lampiran 6: Keterangan Turnitin

Lampiran 7: Berita Acara Seminar Proposal



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Guna memperjelas persepsi pokok permasalahan, maka perlu penjelasan judul dengan makna atau definisi yang terkandung didalamnya. Judul karya ilmiah ini adalah “Tinjauan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Terkait Kriteria Kuota Perempuan Dalam Anggota Legislatif (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung)”. Judul tersebut terdiri dari beberapa istilah sebagai berikut:

1. Tinjauan menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu hasil meninjau atau pandangan atau pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹
2. *Fiqh siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri dan lebih di fokuskan kepada *Siyasah Dusturiyah* yang membahas lebih spesifik mengenai konstitusional atau undang-undang dasar.²
3. Implementasi diartikan sebagai suatu penerapan, pelaksanaan, maksud dari pelaksanaan ini adalah pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang memuat antara lain kriteria kuota perempuan dalam anggota legislatif .³

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama) h. 762

²Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002), h. 26.

³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*...., h. 342.

Berdasarkan penjelasan di atas maka judul penelitian ini adalah “Tinjauan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Terkait kriteria Kuota Perempuan Dalam anggota legislatif (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung)” adalah untuk mengkaji Implementasi dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Terkait Kriteria Kuota Perempuan Dalam anggota legislatif Ditinjau dari *Fiqh Siyasah Dusturiyah* di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.

B. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya pemilu merupakan salah satu sarana utama bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan dan menegakkan tatanan politik yang demokratis. Hal ini menunjukkan bahwa antara laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki kebebasan dalam menentukan hak pilihnya, yang pada hakikatnya hubungan dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan haruslah sama, seimbang dan setara. Jabatan politik memiliki kekuatan dan kekuasaan yang lebih tinggi karena dipilih langsung oleh rakyat, tidak memiliki pola pikir yang cenderung tidak menerima suatu perbedaan. Karena setiap orang dalam politik memiliki hal yang sama untuk dipilih dan memilih. Lebih khusus politik tidak mengenal suatu perbedaan jenis kelamin tetapi lebih kepada kemampuan seseorang dalam memberi pengaruh dan perubahan yang baik pada suatu daerah.

Kehadiran perempuan dalam ranah politik kini menjadi syarat penting dari partai politik, dimana keterwakilan 30% perempuan dalam kepengurusan partai politik pusat menjadi syarat partai politik dalam mencalonkan kadernya kepada komisi pemilihan umum (KPU). Hal ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah pada Tahun 2008 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Pada Pemilu tahun 2008 diharuskan untuk memenuhi target yakni (30%) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang pemilu anggota (Dewan Perwakilan Rakyat) DPR, (Dewan Perwakilan Daerah) DPD, dan (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) DPRD dalam pasal 53 yang menjelaskan bahwa “daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan. Namun sangat disayangkan dalam Pemilu 2014-2019 keterwakilan perempuan mengalami penurunan. Jumlah caleg perempuan yang terpilih menjadi anggota DPR 2014-2019 sebanyak 97 orang dari 560 kursi atau setara dengan 17,32%. Jumlah perempuan anggota DPR pada periode ini menurun dibandingkan dengan periode 2009-2014. Pada periode 2009-2014, terpilih 103 perempuan sebagai anggota DPR. Pileg 2014 hanya mampu menghasilkan keterwakilan perempuan di legislatif sebanyak 97 kursi (17,32%) di DPR, 35 kursi (26,51%) di DPD, rata-rata 16,14% di DPRD, serta 14% di DPRD kabupaten/kota.⁴

Kemudian pada periode 2019-2024 Sebanyak 575 anggota DPR RI 2019-2024 terpilih resmi dilantik dan diambil sumpahnya pada 1 Oktober 2019 lalu. Dari jumlah itu sebanyak 463 orang (80,52 %) adalah laki-laki dan 112 orang (19,48%) perempuan. Pada Pemilu serentak periode 2019-2024 ini terjadi peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen bahkan jika ditarik lebih kebelakang jumlahnya jadi yang tertinggi dibanding pemilu-pemilu sebelumnya.⁵ Peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik, terutama dalam Pemilu, tersebut tidak terjadi secara serta merta, namun karena perjuangan yang terus menerus untuk memperjuangkan hak setiap orang untuk mencapai

⁴<http://www.beritasatu.com/nasional/> , diakses pada tanggal, 11 Desember 2020.

⁵<https://www.kpu.go.id/index.php/post/read>, diakses pada tanggal, 13 Desember 2020.

kesamaan hak dan keadilan, salah satunya adalah dengan mewujudkan peraturan perundang-undangan yang memiliki keberpihakan afirmatif (kebijakan yang diambil agar golongan/gender tertentu memperoleh peluang yang sama dengan golongan yang lain di bidang yang sama) terhadap keterwakilan perempuan.

Lampung adalah salah satu Provinsi yang ikut andil dalam Pemilu serentak periode 2019-2024. Di Lampung ada sebanyak 15 Kabupaten yang diwakilkan oleh 85 orang yang menjadi anggota DPRD Provinsi 2019-2024 dan terdiri dari 17 orang perempuan, jika di persentasekan $(17/85) \times 100\% = 0.2 \times 100\% = 20\%$ artinya jumlah keterwakilan perempuan di dalam anggota legislatif hanya 20% dari kuota 30% yang diberikan oleh pemerintah.⁶ Berdasarkan data di atas di provinsi pun tidak memenuhi ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan.

Bandar Lampung adalah salah satu kota yang ada di provinsi Lampung. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum maka ditetapkan 16 partai politik yang ikut dalam pencalonan anggota legislatif tahun 2019 namun, di dalam 16 partai politik tersebut terdapat 3 partai politik yang tidak memenuhi kriteria kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif.

Artinya berdasarkan keterangan data di atas bahwa keterwakilan perempuan dalam anggota legislatif atas peraturan undang-undang nomor 10 tahun 2008 Tentang Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Daerah (DPRD), anggota DPRD Kota Bandar Lampung masih belum memenuhi ketentuan kuota 30%. Untuk meninjau lebih dalam maka penulis tertarik mengkaji tentang

⁶ <https://www.puskapol.ui.ac.id/data-dprd-provinsi-terpilih-2019-lampung>, Diakses Pada Tanggal, 17 Februari 2021.

Implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Terkait Kriteria Kuota Perempuan Dalam Anggota Legislatif Di Komisi Pemilihan Umum kota Bandar Lampung.

Hukum Islam tidak mengharamkan perempuan untuk mengambil dan melakukan hak-hak politik dan juga tidak menutupi persamaannya dengan laki-laki dalam hak dan kewajiban. Islam juga tidak melarang perempuan menduduki jabatan politik. Dasar umum yang telah disepakati oleh umat bahwa seluruh kaum muslimin baik laki-laki ataupun perempuan adalah sama dalam hukum dan agama.⁷

Firman Allah untuk kaum laki-laki dan kaum perempuan adalah sama, maka dengan demikian perempuan berhak mendapatkan apa yang didapatkan oleh laki-laki dari hak memilih sebagai sarana yang dapat dipergunakan untuk mewujudkan apa yang dimaksud oleh Allah SWT. perempuan juga berhak untuk dipilih menjadi anggota dewan atau menjadi anggota umat khusus. Ibnu Qayyim juga berkata: “perempuan yang adil sama seperti laki-laki dalam kejujuran, amanah, dan keagamaan”. sebagaimana dari Syaikh Islam Ibnu Taimiyah: keadilan perempuan setara dengan keadilan laki-laki⁸.

Seperti dalam firman Allah pada surat at-Taubah ayat 71 :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ
يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ

⁷Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta: Amzah, 2005), h. 152.

⁸Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*...., h. 154.

وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ

اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦١﴾

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Apabila watak dan tabiat antara kaum laki-laki dan wanita adalah sama, maka orang-orang mukmin laki-laki dan wanita, sebagian dari mereka menjadi wali atau penolong bagi sebagian yang lain. Orang-orang munafik laki-laki dan wanita, meskipun karakter dan tabiat mereka sama, maka mereka tidak sampai pada tingkat sebagai penolong bagi sebagian yang lain. Karena kewalian itu membutuhkan suatu keberanian, bantuan, kerjasama, dan rasa saling menanggung beban dan rasa senasib sepenanggungan. Sedangkan, tabiat munafik tidak mau melakukan ini, walaupun terhadap sesama orang munafik sendiri.

Orang-orang munafik itu *individualistik*, mereka hanya mementingkan diri sendiri, lemah, dan kerdil. Mereka bukan sebagai kelompok yang solid, kompak, kuat, saling menjamin sebagaimana tampak dalam tabiat, akhlak, dan perilaku di antara mereka. Ada empat sifat yang melekat pada orang mukmin (amar bil ma'ruf menyuruh mengerjakan kebaikan', nahyu "anil-munkar" mencegah dari yang munkar', mendirikan shalat, dan menunaikan zakat) ini merupakan kebalikan dari sifat-sifat orang munafik. Yaitu, amar bil munkar" menyuruh menyuruh mengerjakan yang mungkar', nahyu „anil-ma“ruf“ melarang

berbuat kebaikan', melupakan Allah, dan menggenggam tangan (tidak mau menunaikan zakat atau memberi bantuan). Rahmat Allah bagi orang-orang mukmin merupakan kebalikan laknat Allah bagi orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Orang-orang mukmin yang memiliki sifat-sifat seperti inilah yang dijanjikan Allah untuk diberi pertolongan dan kekuasaan di muka bumi, agar mereka dapat melaksanakan ajaran yang benar dan lurus kepada manusia. "Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana."(at-Taubah Ayat 71). Mahakuasa disini dimaksudkan untuk memperkasakan golongan beriman, supaya sebagian mereka dapat menjadi penolong bagi sebagian yang lain dalam mengemban tugas-tugas ini. Mahabijaksana dalam menentukan pertolongan dan keperkasaan bagi mereka agar mereka layak memimpin dunia dan menjaga kalimat Allah di antara manusia.⁹ Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui Implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Terkait Kuota Perempuan Dalam Anggota Legislatif di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung, kemudian meninjaunya dalam pandangan *Fiqh Siyasah Dusturiyah*.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan penetapan area spesifikasi yang akan diteliti. Penelitian ini dilakukan di Komisi Pemilihan Umum kota Bandar Lampung, dan berfokus kepada implementasi undang-undang nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Terkait Kriteria kuota perempuan dalam anggota legislatif.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan suatu rumusan masalah sebagai berikut:

⁹ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an* . (Jakarta : Gema Insani, 2004), h. 377.

1. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Terkait Kriteria Kuota Perempuan Dalam Anggota Legislatif di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum terkait Kriteria Kuota Perempuan Dalam anggota legislatif di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Terkait Kriteria Kuota Perempuan Dalam Anggota Legislatif di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.
- b. Untuk meneliti Tinjauan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Terkait Kriteria Kuota Perempuan Dalam Anggota Legislatif Di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian yaitu untuk mengemukakan pernyataan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki nilai guna, baik kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis.

- a. Secara Teoritis, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para Mahasiswa Fakultas Syari'ah, maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan kuota perempuan dalam jabatan politik.

- b. Secara Praktis, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Masalah mengenai kriteria kuota perempuan dalam jabatan politik bukanlah hal yang baru, ada beberapa penelitian yang mengangkat tentang kriteria kuota perempuan dalam jabatan politik antara lain yaitu :

1. *Implementasi Ketentuan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Salatiga, (Ukhty Raqim) Jurusan Politik Dan Ketatanegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.* Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah masih rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD, hal ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam berpolitik kurang di perhatikan. Banyak kendala yang harus dihadapi termasuk masih kurang maksimalnya partai dalam menjalankan, melaksanakan, dan memperjuangkan kegiatan dan kepentingan kaum perempuan sehingga kegiatan tersebut kurang efektif dan kontribusi sosial yang masih kuat pada masyarakat terutama kaum perempuan itu sendiri yang memandang bahwa perempuan tidak mampu bersaing dengan laki-laki, sehingga untuk menjalankan peran tersebut dianggap tidak mampu. Hal seperti ini yang menjadikan minset pada perempuan yang tidak mudah untuk dirubah sehingga ia merasa tidak yakin dan tidak percaya pada dirinya sendiri bahkan pada perempuan lain.¹⁰
2. *Pelaksanaan Pemenuhan Kuota 30% Perempuan Dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Surakarta, (Endah Prabasini) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.* Berdasarkan penelitian ini

¹⁰ Ukhty Raqim, *Implementasi Ketentuan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Salatiga*, Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, h. 96.

diperoleh hasil bahwa pelaksanaan pemenuhan kuota 30% perempuan dalam pemilu DPRD kota Surakarta tahun 2009 itu tidak memenuhi kuota 30% dimana hanya 25% saja yang menduduki jabatan anggota DPRD kota Surakarta karena dari jumlah peserta yang diterima sebanyak 40 orang yang diantaranya 30 anggota laki-laki sedangkan perempuan hanya 10 orang saja yang menduduki jabatan sebagai anggota DPRD periode 2009-2014. Kendala yang dihadapi dalam pemenuhan kuota 30% perempuan dalam pemilu DPRD kota Surakarta yaitu kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan di Surakarta masih rendah, mayoritas masyarakat Surakarta masih terkungkung oleh kultur dan tradisi agama yang tidak memungkinkan untuk membahas isu perempuan secara spesifik. Banyak rintangan untuk mewujudkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif sehingga menjadi tugas kita bersama dalam upaya mewujudkan keterwakilan perempuan yang benar-benar berbasis kesetaraan hak dan keadilan gender.¹¹

3. *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Ketentuan 30% Kuota Keterwakilan Perempuan Dalam Anggota DPRD (Studi DPRD Lampung Barat Tahun 2019-2024), (Mery Kurniati) jurusan hukum tata negara (siyasah syari'yyah) fakultas syariah universitas islam negeri raden intan lampung.* kesimpulan dalam penelitian ini adalah keterwakilan perempuan dalam anggota DPRD lampung barat masih belum memenuhi ketentuan kuota 30%. Meskipun dalam undang-undang tertera daftar calon anggota legislatif minimal 30% keterwakilan perempuan harus terpenuhi namun pada parlemen manapun jatah untuk perempuan duduk di

¹¹ Endah prabasini, *pelaksanaan pemenuhan kuota 30% perempuan dalam pemilihan umum dewan perwakilan rakyat daerah kota Surakarta*, fakultas hukum universitas sebelas maret, 2010 h. 88

parlemen tetaplah 30% supaya terhitung setara kedudukannya.¹²

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa yang menyusun dan mengkaji memiliki spesifikasi tersendiri. Karya ini bisa jadi merupakan bentuk kelanjutan dan melengkapi karya-karya yang terdahulu. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu adalah di dalam penelitian ini secara khusus mengkaji tentang Kriteria Kuota Perempuan Dalam Anggota Legislatif yaitu, tentang pelaksanaan penerapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Kriteria Kuota 30% Perempuan Dalam Anggota Legislatif di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung kemudian meninjaunya dalam pandangan *fiqh siyasah dusturiyah*.

H. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dalam mencapai tujuan dengan teknik dan alat tertentu. Metode penelitian ini berarti proses pencarian data meliputi penentuan penjelasan konsep dan pengukurannya, pengumpulan data dan teknik analisisnya.¹³ Adapun metode yang digunakan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden.¹⁴ Penelitian lapangan merupakan jenis penelitian yang

¹² Meri kurniati, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Ketentuan 30% Kuota Keterwakilan Perempuan Dalam Anggota DPRD*, fakultas syariah universitas islam negeri raden intan lampung, 2020, h. 11

¹³ Cholid Narbuko, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 01.

¹⁴ Susiadi, *Metode Penelitian*, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 9

dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Dalam hal ini data yang diperoleh dari kantor Komisi Pemilihan Umum kota Bandar Lampung.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitik* yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data kemudian disimpulkan.¹⁵ deskriptif adalah metode yang bertumpu pada pencarian fakta-fakta dan interpretasi yang tepat sehingga gambaran dan pembahasan menjadi jelas. Sedangkan analisis adalah cara untuk menguraikan dan menganalisa data dengan cermat, tepat dan terarah.

3. Sumber Data

Sumber data adalah sumber, dimana data penelitian ini dapat di peroleh.¹⁶ Yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data primer yaitu sumber data yang dikemukakan sendiri oleh orang atau pihak pada waktu terjadinya peristiwa atau mengalami peristiwa itu sendiri, seperti buku harian, notulen rapat, dan sebagainya.¹⁷ Sumber data dalam penelitian ini adalah hasil dokumentasi dan wawancara anggota KPU kota Bandar Lampung.
- b. Data sekunder yaitu sumber data yang menjadi pelengkap sumber data primer, di peroleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, hasil

¹⁵Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafik Grafika, 2011), h. 106

¹⁶Saiffudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 91.

¹⁷Susiadi, *Metode Penelitian....*, h. 65

penelitian dan karya ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media dan sebagainya.¹⁸ Populasi dalam penelitian ini adalah pihak yang berkecimpung di KPU kota Bandar Lampung.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap dan dapat dianggap mewakili populasi.¹⁹ Dalam hal ini menentukan sampel, skripsi ini menetapkan sampelnya menggunakan teknik purposive sampling, yang artinya pengambilan sampel yang dilakukan secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan. Adapun yang dijadikan sampel penelitian ini adalah sebanyak 4 orang yang terdiri dari :

- 1) Dra. Suprihatin Jabatan Sekretaris KPU Kota Bandar Lampung;
- 2) Tuyono, S.H. Jabatan Kasubbag Umum;
- 3) Badarudin Amir, S.H. Jabatan Kasubbag Teknis Dan Hupmas;
- 4) Risma Mauli AZ., S.E., M.IP. Jabatan Kasubbag Program Dan Data.

5. Metode Pengumpulan Data

¹⁸Sugiyono, *Metode penelitian pendidikan*, (Bandung : Alfabeta, 2013), h.117.

¹⁹Susiadi, *Metode Penelitian....*, h. 81

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara (*Interview*) adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.²⁰ Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada pihak Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung bagaimana penerapan atau kebijakan dari undang-undang nomor 10 tahun 2008 tentang kuota perempuan dalam jabatan politik yang selanjutnya ditinjau dari hukum Islam.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data untuk memperoleh data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen seperti buku, jurnal, surat kabar, notulen rapat, dan dokumen lainnya.²¹

5. Metode Pengolahan Data

Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam pengolahan data ini adalah:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, sudah sesuai/relevan dengan masalah.

²⁰Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.RinekeCipta, 2013), h 95.

²¹Susiadi, *Metode Penelitian....*, h. 115.

- b. Penandaan data (*coding*) yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku literature, atau dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun terbit) atau urutan rumusan masalah (masalah pertama tanda A masalah kedua tanda B dan seterusnya).
- c. Rekonstruksi data (*reconstructing*) yaitu penyusunan data secara teratur dan berurutan sehingga mudah di pahami.
- d. Sistematisasi data (*systematizing*) yaitu mengelompokkan data dengan menggunakan sistematika bahasa yang berdasarkan dengan urutan permasalahan.

6. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara *kualitatif* yaitu menganalisis data-data atau menggambarkan data hasil penelitian di lapangan dengan cara kata-kata tanpa menganalisis angka-angka dan selanjutnya pengolaan data disajikan secara *deskriptif*, dengan menggambarkan secara lengkap mengenai masalah-masalah berdasarkan penelitian lapangan. Data yang telah terkumpul kemudian penulis menggunakan bentuk metode berfikir yaitu metode *induktif*, suatu metode pemikiran dengan menarik kesimpulan dari hal-hal atau gejala bersifat khusus ditarik *generalisasinya* kesimpulan bersifat umum.²²

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan laporan penelitian ini terbagi dalam lima bab, meliputi Pendahuluan, Landasan Teori,

²² Sudaryono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan Mix Method*, Depok: Rajawali Pers, 2019. h. 200

Deskripsi Objek Penelitian, Analisis Data, Dan Penutup. Berikut adalah penjelasan singkat lima bab tersebut:

Bab Pertama, Pendahuluan. Bab ini menjelaskan tentang Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Metode Penelitian, Dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua, Landasan Teori. Bab Ini Menjelaskan Teori-Teori Terkait Landasan Pelaksanaan Penelitian, Yaitu Teori Demokrasi, Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Keterwakilan Perempuan Dalam Politik, Partisipasi Politik Perempuan, Kriteria Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Dalam Jabatan Politik, Fiqh Siyasah, Pengertian Fiqh Siyasah Dan Ruang Lingkup Fiqh Siyasah.

Bab Ketiga, Deskripsi Objek Penelitian. Bab Ini Menjelaskan Gambaran Umum, Sejarah KPU Kota Bandar Lampung, Visi Dan Misi KPU Kota Bandar Lampung, Tugas Pokok Dan Fungsi KPU Kota Bandar Lampung, Struktur Organisasi KPU Kota Bandar Lampung Dan Data Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Periode 2019-2024.

Bab Keempat, Analisis Data. Bab ini menjelaskan penerapan dari pelaksanaan undang-undang nomor 10 tahun 2008 tentang kriteria kuota perempuan dalam jabatan politik di KPU kota bandar lampung dan meninjaunya dalam pandangan fiqh siyasah dusturiyah.

Bab Kelima, Penutup. Bab ini penulis akan menyimpulkan dari semua pembahasan yang dijelaskan pada bab-bab sebelumnya.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Demokrasi

1. Sejarah Demokrasi

Demokrasi secara *etimologis*, berasal dari (bahasa Yunani) yang merupakan bentuk dari dua kata *demos* (rakyat) dan *cratein* atau *cratos* (kekuasaan dan kedaulatan). Dari kata *demos* dan *cratein* atau *cratos* membentuk kata demokrasi yang memiliki pengertian umum sebagai sebuah bentuk pemerintahan rakyat (*government of the people*) di mana kekuasaan tertinggi terletak di tangan rakyat dan dilakukan secara langsung oleh rakyat atau melalui para wakil mereka melalui mekanisme pemilihan yang berlangsung secara bebas.²³ Demokrasi merupakan asas dan sistem yang paling baik di dalam sistem politik dan ketatanegaraan. Khazanah pemikiran politik di berbagai negara demokrasi adalah pilihan terbaik dari berbagai pilihan lainnya.

Sejarah demokrasi di Indonesia dapat dibagi ke dalam empat periode sebagai berikut:

a. Periode 1945-1959

Demokrasi pada masa ini dikenal dengan sebutan Demokrasi Parlementer. Sistem Parlementer mulai di berlakukan sebulan sesudah kemerdekaan di proklamirkan. Namun demikian, model demokrasi ini kurang di anggap cocok untuk Indonesia. Lemahnya budaya berdemokrasi masyarakat Indonesia untuk mempraktikkan demokrasi model barat yang telah memberi peluang sangat besar kepada partai-partai politik untuk mendominasi kehidupan sosial politik.

²³A. Ubaedillah, *Pancasila Dan Demokrasi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 81.

Ketiadaan budaya demokrasi yang sesuai dengan sistem demokrasi parlementer pada akhirnya melahirkan *fregmentasi* politik berdasarkan *afilasi* kesukuan dan agama. Pemerintahan yang berbasis pada koalisi politik di masa ini tidak mampu bertahan lama, koalisi yang di bangun sangat mudah pecah. Hal ini mengakibatkan *destabilisasi* politik nasional yang mengancam integrasi nasional yang tengah di bangun. Persaingan tidak sehat antara faksi-faksi politik dan pemberontakan daerah terhadap pemerintah pusat telah mengancam berjalannya demokrasi itu sendiri.

Faktor-faktor di sintegrif di atas, di tambah dengan kegagalan partai-partai dalam majelis *konstituante* untuk mencapai *consensus* mengenai dasar Negara untuk undang-undang dasar baru, mendorong presiden soekarno untuk mengeluarkan dekrit presiden pada 5 juli 1959, yang menegaskan berlakunya kembali undang-undang dasar 1945. Dengan demikian, masa demokrasi berdasarkan sistem parlementer berakhir, di gantikan oleh demokrasi terpimpin (*guided demovracy*) yang memosisikan presiden soekarno menjadi pusat kekuasaan Negara.²⁴

Karakteristik demokrasi parlementer atau demokrasi liberal sebagai berikut, parlemen memegang kekuasaan politik sangat besar, system multipartai. Parlemen terdiri dari wakil-wakil partai yang berasal dari beragam aliran/ideologi, pengawasan yang ketat dari parlemen menyebabkan akuntabilitas pejabat Negara sangat tinggi, cabinet pemerintahan koalisi tidak stabil dan kerap berganti, pemilu

²⁴ A.Ubaedillah, *Pancasila Dan Demokrasi*...., h. 90.

1955 terlaksana sangat demokratis, hal berserikat dan berkumpul terjamin dengan jelas. Peralihan periode ini sebagai berikut, instabilitas politik dan pemberontakan diberbagai daerah, pemulihan dilakukan dengan mengakhiri demokrasi parlementer dan menerapkan demokrasi terpimpin, dekrit presiden 5 juli 1959 membubarkan konstituante dan kembali ke UUD 1945.

b. Periode 1959-1965

Periode ini di kenal dengan sebutan Demokrasi Terpimpin (*duided democracy*). Ciri-ciri demokrasi ini adalah dominasi politik presiden dan berkembangnya pengaruh komunis dan peranan tentara ABRI dalam panggung politik nasional hal ini di sebabkan oleh lahirnya dekrit presiden 5 juli 1959 sebagai usaha untuk mencari jalan keluar dari kebuntutan politik melalui pembentukan kepemimpinan personal yang kuat. Sekalipun UUD 1945 memberi peluang seorang presiden untuk memimpin pemerintahan selama lima tahun, ketetapan MPRS No. III/1963 mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Dengan lahirnya ketetapan MPRS ini secara otomatis telah mebatalkan pembatasan waktu lima tahun sebagaimana ketetapan UUD 1945.

Kepemimpinan Presiden Soekarno tanpa batas ini terbukti melahirkan tindakan dan kebijakan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan undang-undang dasar 1945, misalnya, pada tahun 1960 Presiden Soekarno membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum, padahal dalam penjelasan undang-undang dasar 1945 secara eksplisit di

tentukan bahwa presiden tidak memiliki wewenang untuk berbuat demikian. Dengan kata lain, sejak di berlakukan Dekrit Presiden 1959 secara eksplit di tentukan bahwa presiden tidak memiliki wewenang untuk berbuat demikian. Dengan kata lain , sejak di berlakukan Dekrit Presiden 1959 telah terjadi penyimpangan konstitusi oleh Presiden Soekarno.

Pandangan sejarawan Ahmad Syari'i Ma'arif, demokrasi dipimpin sebenarnya ingin menempatkan presiden soekarno ibarat seorang ayah dalam sebuah keluarga besar yang bernama Indonesia dengan kekuasaan terpusat berada di tangannya. Hal tersebut bertentangan dan merupakan kekeliruan yang sangat besar bagi implementasi UUD 1945. Demokrasi dipimpin model presiden soekarno mengandung pengingkaran terhadap nilai-nilai demokrasi, yakni lahirnya absolutisme dan terpusatnya kekuasaan pada diri pemimpin, dan pada saat yang sama, hilangnya control sosial dan *check and balance* dari legislatif terhadap eksekutif.

Kondisi ini masih di perburuk dengan peran politik partai komunis Indonesia (PKI) yang mendominasi di kehidupan politik Indonesia. Bersandar pada Dekrit Presiden 5 Juli sebagai sumber hukum, di dirikannya badanyak badan ekstra konstitusional seperti front nasional yang di gunakan oleh PKI sebagai wadah kegiatan politik.front nasional telah di manipulasi oleh PKI untuk menjadi bagian dari strategi taktik komunisme internasional yang menggariskan pembentukan front nasional sebagai persiapan kea rah

terbentuknya demokrasi rakyat. Strategi politik PKI untuk mendulang keuntungan dari karisma kepemimpinan presiden soekarno dilakukan dengan cara mendukung pemberedelan pers dan partai politik yang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintahan seperti yang dilakukan presiden atas partai masyumi.

Perilaku politik PKI yang sewenang-wenang ini tentu tidak di biarkan begitu saja oleh partai-partai politik lainnya dan kalangan militer (TNI), yang pada waktu itu merupakan salah satu komponen politik penting presiden soekarno. Akhir dari sistem demokrasi dipimpin soekarno yang berakibat pada perseteruan politik ideologis antara PKI dan TNI adalah peristiwa berdarah yang di kenal dengan Gerakan 30 September 1945. Karakteristik demokrasi dipimpin pada periode ini sebagai berikut, system kepartaian melemah karena kekuasaan presiden yang semakin besar, peran control DPR gotong royong (DPR-GR) melemah, pemilu tidak terselenggara, upaya konsolidasi kekuatan politik dengan cara pembentukan cabinet gotong royong yang mewakili semua fraksi dan partai, upaya konsolidasi kekuatan politik dengan cara pembentukan dewan nasional yang dibentuk dari golongan fungsional (wakil buruh, petani, pendeta, ulama, wanita,dll), sentralisasi kekuasaan di tangan presiden, kewenangan daerah terbatas, kebebasan pers dibatasi, jumlah media dibredel. Peralihan periode ini sebagai berikut, kudeta gagal PKI lewat G30S pada 1965, kepemimpinan yang dijalankan tidak memperbaiki kemelut ekonomi dan sosial,

soekarno tersingkir dari kekuasaan dan digantikan soeharto.

c. Periode 1965-1998

Periode ini merupakan masa pemerintahan presiden soeharto dengan orde barunya. Sebutan orde baru merupakan kritik terhadap periode sebelumnya, orde lama. Orde baru, sebagaimana, dinyatakan oleh pendukungnya, adalah upaya untuk meluruskan kembali penyelewengan terhadap undang-undang dasar 1945 yang terjadi dalam masa Demokrasi Terpimpin²⁵. Seiring pergantian kepemimpinan nasional, demokrasi terpimpin ala presiden soekarno telah di ganti oleh elite orde baru dengan Demokrasi Pancasila. Beberapa kebijakan pemerintah sebelumnya yang menetapkan masa jabatan presiden seumur hidup untuk presiden soekarno telah di hapuskan dan di ganti dengan pembatasan jabatan presiden lima tahun dan dapat di pilih kembali melalui proses pemilu.

Demokrasi pancasila secara garis besar menawarkan tiga komponen demokrasi. *Pertama*, demokrasi dalam bidang politik pada hakikatnya adalah menegakkan kembali asas-asas Negara hukum dan kepastian hukum. *kedua*, demokrasi dalam bidang ekonomi pada hakikatnya adalah kehidupan yang layak bagi semua warga Negara. *Ketiga*, demokrasi dalam bidang hukum pada hakikatnya bahwa pengakuan dan perlindungan HAM, peradilan yang bebas yang tidak memihak.

Pelaksanaan ajaran pancasila secara murni dan konsekuen, demokrasi pancasila

²⁵ A.Ubaedillah, *Pancasila Dan Demokrasi*...., h. 91.

yang di kampanyekan oleh orde baru sebatas retorika politik belaka. Dalam praktik kenegaraan dan pemerintahannya, penguasa orde baru bertindak jauh dari prinsip-prinsip demokrasi. Penguasa orde baru bertindak jauh dari prinsip-prinsip demokrasi. Ke tidak demokratisan penguasa orde baru di tandai oleh: dominannya peranan militer (ABRI); birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik; pengebirian peran dan fungsi partai politik; campur tangan pemerintah dalam berbagai urusan partai politik dan public; politik masa mengambang; monolitisasi ideology Negara; dan inkorporasi lembaga non-pemerintah.²⁶ Karakteristik demokrasi pancasila sebagai berikut, kekuasaan presiden sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan sangat tinggi, partai politik dibatasi jumlah dan peran politiknya, pemilu terselenggara teratur setiap lima tahun, tidak ada pergantian kekuasaan politik, Soeharto berkuasa selama lima periode pemilu, rekrutmen politik bersifat tertutup, peran militer sangat kuat dengan konsep dwifungsi ABRI, kebebasan pers dibatasi. Pembredelan media massa kerap terjadi. Peralihan periode ini sebagai berikut, di akhir orde baru, perekonomian kacau, harga BBM dan kebutuhan pokok melambung, demonstrasi massa dimotori mahasiswa menuntut reformasi dan mundurnya soeharto, pemerintahan mandek akibat sebagian besar menteri mengundurkan diri, soeharto mengundurkan diri sebagai presiden pada 21 mei 1998.

d. Periode pasca-orde baru

²⁶A.Ubaedillah, *Pancasila Dan Demokrasi....*, h. 91.

Periode pasca-orde baru sering di sebut dengan era reformasi. Periode ini erat hubungannya dengan gerakan reformasi rakyat yang menuntut pelaksanaan demokrasi dan HAM secara konsekuen. Tuntutan ini di tandai dengan lengsernya presiden soeharto dari tampuk kekuasaan orde baru pada mei 1998, setelah lebih dari tiga puluh tahun berkuasa dengan demokrasi pancasilanya. Penyelewengan dasar Negara pancasila oleh penguasa orde baru berdampak pada sikap antipasti sebagian masyarakat terhadap dasar Negara tersebut.

Pengalaman pahit yang menimpa pancasila, yang pada dasarnya sangat terbuka, inklusif, dan penuh nuansa HAM, berdampak pada keengganan kalangan tokoh reformasi untuk menambahkan atribut tertentu pada kata demokrasi. Bercermin pada pengalaman manipulasi atas pancasila oleh penguasa orde baru adalah demokrasi tanpa nama atau demokrasi tanpa embel-embel di mana hak rakyat merupakan komponen inti dalam mekanisme dan pelaksanaan pemerintahan yang demokratis. Wacana demokrasi pasca-orde baru erat kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat madani (*civil society*) dan penegakkan HAM secara sungguh-sungguh.²⁷ Karakteristik masa reformasi sebagai berikut, system pemerintahan presidensial, parlemen terdiri dari banyak partai (multipartai), system pemilihan langsung untuk presiden dan kepala daerah, lembaga perwakilan dibagi menjadi DPR dan DPD, desentralisasi kekuasaan dengan

²⁷Suparman Marzuki, *Politik Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 4.

model otonomi daerah, kebebasan pers lebih baik, dibentuknya komisi-komisi independen Negara seperti KPK.

2. Ciri-Ciri Demokrasi

Demokrasi merupakan gagasan yang mengandaikan bahwa kekuasaan itu adalah dari oleh dan untuk rakyat. Dalam pengertian yang lebih partisipatif demokrasi itu bahkan disebut sebagai konsep kekuasaan dari, oleh, untuk rakyat²⁸. Artinya kekuasaan itu pada pokoknya di akui berasal dari rakyat dan karena itu rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan. Keseluruhan sistem penyelenggaraan negara itu pada dasarnya juga di peruntukkan bagi seluruh rakyat itu sendiri. Bahkan negara yang baik di idealkan pula agar diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat dalam arti dengan melibatkan masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya. Keempat ciri itulah yang tercakup dalam pengertian kedaulatan rakyat, yaitu bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, diselenggarakan untuk rakyat dan oleh rakyat sendiri. Hendry B. Mayo, mencatat setidaknya ada 8 ciri utama yang harus diperhatikan untuk menilai apakah suatu masyarakat bersifat demokratis atau tidak, yaitu:

- a. Adanya penyelesaian perselisihan dengan damai dan suka rela;
- b. Adanya jaminan bagi terjadinya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah;
- c. Adanya pergantian penguasa yang berlangsung secara teratur;
- d. Adanya pembatasan atas pemakaian kekerasan cara minimum;

²⁸ A.Ubaedillah, *Pancasila Dan Demokrasi....*, h. 83

- e. Adanya pengakuan dan penghormatan atas keanekaragaman;
- f. Adanya jaminan penegakan keadilan;
- g. Adanya upaya memajukan ilmu pengetahuan;
- h. Adanya pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan.

3. Macam-macam demokrasi

Macam-macam Demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat sebagai berikut:

a. Demokrasi Langsung

Demokrasi Langsung Berarti Paham Demokrasi Yang Mengikutsertakan Setiap Warga Negaranya Dalam Permusyawaratan Untuk Menentukan Kebijakan Umum Atau Undang-Undang. Demokrasi Ini Dipraktekkan Pada Masa Yunani Kuno, Akan Tetapi Secara Prinsip Demokrasi Model Ini Mengalami Kesulitan-Kesulitan Teknis Untuk Dipraktekkan Pada Masa Modern Terhadap Konsep Negara Nasional. Demokrasi ini membutuhkan partisipasi luas warga dalam berpolitik, demokrasi langsung adalah ketika warga Negara dapat menentukan kebijakan secara langsung, tanpa perwakilan, perantara atau majelis parlemen. Jika pemerintah harus mengesahkan undang-undang atau kebijakan tertentu, peraturan tersebut ditentukan oleh rakyat. Mereka memberikan suara pada suatu masalah dan menentukan nasib Negara mereka sendiri.

b. Demokrasi Tidak Langsung

Demokrasi tidak langsung berarti paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Penerapan sistem demokrasi ini berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang

jumlah penduduknya semakin banyak, wilayahnya semakin luas, dan permasalahan yang dihadapi semakin rumit dan kompleks (negara kebangsaan). Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan biasanya dilaksanakan melalui pemilihan umum. Keberadaan lembaga perwakilan ini dalam demokrasi modern adalah sangat penting dan berarti dalam suatu negara bangsa. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi represntatif adalah ketika orang memilih siapa yang akan mewakili suara mereka diparlemen. Demokrasi ini adalah bentuk demokrasi yang paling umum ditemukan diseluruh dunia. Sebagian besar Negara demokrasi tidak langsung didunia menganggap diri mereka sebagai Negara demokrasi liberal, ini karena mereka lebih menghargai kebutuhan warga Negara mereka dari pada kebutuhan seluruh Negara.²⁹

Demokrasi berdasarkan prinsip Ideologi sebagai berikut:

- 1). Demokrasi Liberal berdasarkan atas hak individu suatu negara yang menekankan suatu kebebasan setiap individu dan sering mengabaikan kepentingan umum.
- 2). Demokrasi Rakyat berdasarkan atas hak pemerintah dalam suatu negara yang didasari dri paham sosialisme dan komunisme yang mementingkan kepentingan negara dan kepentingan umum.
- 3). Demokrasi Pancasila yang bersumber dari tata nilai sosial dan budaya bangsa indonesia dengan berdasarkan musyawarah dan mufakatyang mengutamakan kepentingan umum.

4. Prinsip-Prinsip Demokrasi

²⁹ Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi, Dan Judicial Review*, (Yogyakarta: Raja Wali Press, 2005), h. 12.

Perspektif yang bersifat horizontal, gagasan demokrasi yang berdasar atas hukum (*constitutional democracy*) mengandung sebelas prinsip pokok, yaitu ;

- a. Adanya jaminan dan kesetaraan dalam kehidupan bersama;
- b. Pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan atau pluralitas;
- c. Adanya aturan yang mengikat dan di jadikan sumber rujukan bersama;
- d. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan mekanisme aturan yang ditaati bersama itu;
- e. Pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- f. Pembatasan kekuasaan melalui mekanisme pemisahan dan pembagian kekuasaan di sertai mekanisme penyelesaian sengketa ketatanegaraan antar lembaga negara, baik secara vertical maupun horizontal;
- g. Adanya peradilan yang bersifat independen dan tidak memihak (*independent and impartial*) dengan kewibawaan putusan yang tertinggi atas dasar keadilan dan kebenaran;
- h. Di bentuknya lembaga peradilan yang khusus untuk menjamin keadilan bagi warga Negara yang di rugikan akibat putusan atau kebijakan pemerintah (pejabat administrasi Negara);
- i. Adanya mekanisme *judicial review* oleh lembaga peradilan terhadap norma-norma ketentuan legislative, baik yang di tetapkan oleh lembaga legislative maupun oleh lembaga eksekutif;
- j. Di buatnya konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur jaminan-jaminan pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut di atas;

- k. Pengakuan terhadap asas legalitas atau *due process of law* dalam keseluruhan system penyelenggara³⁰

Kesebelas prinsip tersebut terkandung pengertian-pengertian demokrasi sekaligus nomokrasi sebagaimana diuraikan di atas. Kesemuanya menjadi prasyarat penting bagi bangsa dan Negara kita untuk membangun masa depan yang lebih baik.

5. Unsur-Unsur Pendukung Tegaknya Demokrasi

Tegaknya demokrasi sebagai tatanan kehidupan kenegaraan sangat tergantung pada unsur-unsur penopang tegaknya demokrasi itu sendiri. Beberapa unsur penting tersebut antara lain:

- a. Negara hukum Negara hukum adalah negara yang memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui kelembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak serta adanya penjaminan HAM.
- b. Masyarakat madani Masyarakat madani yakni sebuah masyarakat dengan ciri-ciri terbuka, egaliter, bebas dari dominasi dan tekanan negara, serta berpartisipasi aktif dalam menegakkan demokrasi.
- c. Aliansi kelompok strategis Komponen berikutnya yang dapat mendukung tegaknya demokrasi adalah adanya aliansi kelompok strategis yang terdiri dari partai politik, kelompok gerakan dan kelompok penekan atau kelompok kepentingan termasuk di dalamnya pers yang bebas dan bertanggung jawab.³¹

B. Pemilihan Umum

Salah satu pilar pokok dalam setiap sistem demokrasi adalah adanya mekanisme penyaluran pendapat

³⁰ Jimly Ashiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 298

³¹ Gianto, *Pendidikan Filsafat Pancasila Dan Kewarganegaraan* (Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), h. 132.

rakyat secara berkala melalui pemilihan umum, di dalam membangun tatanan pemerintahan harus ada kesinambungan antara rakyat dan pemerintah agar di dalam merealisasikan nilai-nilai demokrasi berjalan dengan profesionalitas, demokrasi dalam pemahaman masyarakat Indonesia yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, yang artinya kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat itu sendiri.

Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Terdapat tiga tujuan dalam pemilu sebagai berikut:

1. Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan kebijakan umum (public policy). Dalam demokrasi, kedaulatan sangat di junjung tinggi sehingga di kenal dari, oleh dan untuk rakyat. Dalam sistem demokrasi perwakilan (*representation democracy system*), rakyat memiliki kedaulatan penuh akan tetapi pelaksanaan di lakukan oleh wakil-wakilnya melalui lembaga legislatif parlemen. Wakil rakyat tidak sembarang orang, seseorang yang memiliki otoritas ekonomi atau otoritas kulturalpun tidak layak menjadi wakil rakyat tanpa moralitas, integritas dan akuntabilitas yang memadai. Karena itu di selenggarakan pemilu sebagai mekanisme penyeleksi dan pendelegasi kedaulatan kepada orang atau partai.
2. Pemilu juga merupakan mekanisme memindahkan konflik kepentingan (*conflict of interest*) dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat

melalui wakil-wakil terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi atau kesatuan masyarakat tetap terjamin. Manfaat pemilu ini berkaitan dengan asumsi bahwa masyarakat memiliki kepentingan yang berbeda-beda dan bahkan saling bertentangan, dan pertentangan ini semestinya di selesaikan melalui proses musyawarah. Dalam kenyataannya seringkali elit partai politik justru mendorong terjadinya konflik. Konflik itu disebabkan oleh lemahnya perlembagaan politik ditingkat elit, yang mencerminkan kegagalannya sebagai wakil rakyat.

3. Pemilihan umum merupakan sarana memobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik. Hal yang terakhir ini semakin urgent karena belakangan masyarakat mengalami semacam alienasi dari proses pengambilan kebijakan. Atau ada jarak yang lebar antara proses pengambilan kebijakan dan kepentingan, elite dengan aspirasi ditingkat akar rumput yang setiap saat bisa mendorong ketidakpercayaan terhadap partai politik dan pemerintahan.

Pergantian pemerintahan adalah suatu hal yang sangat wajar, mengingat kemampuan seseorang itu ada batasnya. Pergantian pemerintahan di negara-negara totaliter berbeda dengan yang terjadi di negara-negara demokrasi. Di negara-negara totaliter pergantian pemerintahan ditentukan oleh sekelompok orang, sedangkan dalam negara demokrasi di tentukan oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Pemerintahan ada karena rakyat ada, memilih sebagian rakyat untuk menjadi pemerintah adalah suatu proses dan kegiatan yang seyogyanya merupakan hak semua rakyat yang kelak diperintah oleh orang-orang terpilih. Proses dan kegiatan memilih itu disederhanakan penyebutannya melalui pemilihan. Dalam hal pemilihan

semua rakyat harus ikut tanpa membedakan, suku, ras, dan golongan, maka digunakan istilah pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagai berikut:

1. Langsung yaitu rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung.
2. Umum yaitu pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti pemilu.
3. Bebas yaitu setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Didalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.³²
4. Rahasia yaitu dalam memberikan suaranya pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan.
5. Jujur yaitu dalam penyelenggaraan pemilu, setiap penyelenggara pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Adil yaitu dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Terdapat beberapa fungsi pemilu yang tidak bisa di pisahkan satu dengan yang lainnya:

1. Sebagai sarana legitimasi politik. Fungsi legitimasi ini terutama menjadi kebutuhan pemerintah dan

³²Ubedilah Badrun, *System Politik Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), h. 79.

sistem politik yang mewadahi format pemilu yang berlaku.³³ Dalam fungsi ini pemilu dapat mengubah suatu kecenderungan keterlibatan politik massa dari yang bersifat sporadik dan dapat membahayakan menjadi suatu sumber utama bagi otoritas dan kekuatan politik.

2. Sebagai fungsi perwakilan rakyat. Fungsi ini terutama mejadi kebutuhan rakyat, baik dalam rangka, mengevaluasi maupun mengontrol perilaku pemerintah dan program serta kebijakan yang dihasilkannya. Pemilihan umum dalam kaitannya ini merupakan mekanisme demokratisasi bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakil yang dapat dipercaya yang akan duduk dalam pemerintahan maupun lembaga legislative.seringkali menjadi sumber konflik yang bisa menggoyahkan sendi-sendiri atau nilai-nilai demokrasi itu sendiri.
3. Sebagai mekanisme bagi pergantian atau sirkulasi elit penguasa. Keterkaitan dengan Pemilihan Umum dengan sirkulasi elit didasarkan pada asumsi bahwa elit berasal dari dan bertugas mewakili masyarakat luas.

C. Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum adalah nama yang diberikan oleh Undang-Undang tentang Pemilu untuk lembaga penyelenggara pemilu. UUD 1945 Amandemen pasal 22E, menerangkan bahwa nama lembaga penyelenggara pemilu tidak diharuskan bernama Komisi Pemilihan Umum, melainkan perkataan umum untuk menyebutkan lembaga penyelenggara Pemilu, sehingga sebenarnya UU dapat saja memberikan nama lain untuk menyebut lembaga penyelenggara Pemilu. Keterangan mengenai KPU pun dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008

³³Inu Kencana Syafie, *Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), h.9.

Tentang Pemilihan Umum Pasal 1 Ayat 7 yang menyebutkan bahwa KPU adalah :

“Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah, penyelenggara Pemilu di provinsi dan kabupaten/kota. Komisi pemilihan umum”.³⁴

KPU merupakan suatu lembaga independen penyelenggara pemilihan umum di Indonesia yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pemilu dinyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

KPU mempunyai arti penting dalam jalannya Pemilu di Indonesia sebagai lembaga yang sangat berperan di dalam mengatur pelaksanaan Pemilu sehingga diharapkan perannya dapat membawa Pemilu kepada demokrasi yang jujur dan adil. Pasal 6 Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2005 KPU Daerah sebagai penyelenggaran pemilihan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara.
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan peraturan perundang undangan.
3. Menyampaikan laporan kepada DPRD untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya pada masyarakat.

³⁴ Undang-Undang Ri Nomor 10 Tahun 2008. Tentang Pemilu. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). h. 4.

4. Memelihara arsip dan dokumen pemilih serta mengelola barang inventaris milik KPUD berdasarkan peraturan perundang -undangan.
5. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran.
6. Melaksanakan semua tahapan pemilihan secara tepat waktu.

D. Keterwakilan Perempuan Dalam Politik

Telaah terhadap peran perempuan di dalam politik masih sangat kurang. yang menjadi kendala utama adalah adanya cara pandang yang patriarki oleh laki-laki, bahkan mayoritas kaum perempuan sendiri masih dikuasai oleh cara pandang dan memperlakukan perempuan secara patriarki. Budaya patriarki dikalangan masyarakat mengakar dan mendominasi tiap ruang kehidupan keseharian, tentu ini di adopsi oleh masyarakat konvensional. Masyarakat yang masih kuat memegang kuat adat dan budaya murni. Ditambahkan dengan pengakuan yang diperkuat oleh media, tayangan-tayangan media massa meposisi perempuan sebagai objek kedua setelah laki-laki, peran ibu rumah tangga, pembantu dan banyak hal lain yang melekat pada perempuan adalah peran sebagai wilayah kedua setelah laki-laki.

Perempuan dinilai tidak mampu memimpin dan membuat kebijakan tegas karena hal-hal yang telah membentuk perempuan sebagai makhluk perasaan, artinya perempuan tidak dapat secara tegas memberikan keputusan ketika menggunakan sisi perasaan dalam menilai sebuah keputusan.

Persepsi negative tersebut dilekatkan pada perempuan sendiri telah terstruktur sedemikian rupa di benak perempuan dan kaum laki-laki Membedah anggapan tentang perempuan politik pada dasarnya tidak semudah dengan objek bahasa hak asasi manusia. Judgement terhadap

budaya patriarki mengkokohkan mitos tentang perempuan secara kuat. Jika berbicara tentang kepemimpinan perempuan maka masalah yang paling dekat dengan hal tersebut adalah benturan pemberdayaan perempuan terhadap agama, sosial, bahkan termasuk politik. Secara agama, adanya doktrinisasi bahwa perempuan berada pada wilayah haram jika harus memimpin kaum laki-laki. Meski demikian, tidak berarti sama sekali tertutup bagi perempuan untuk melenggang dalam percaturan politik.

Terbukti hadir sebagai pemimpin, misalnya Benazir Bhutto, Mega Wati Soekarno Putri. Pada dasarnya, perempuan memiliki hak secara penuh terhadap pemenuhan kebutuhan tentang dirinya, termasuk berpolitik. Hasrat sebagai manusia, kesamaan akan kebutuhan membenarkan bahwa perempuan mempunyai kedudukan setara membawa kepemimpinan di muka bumi ini. Perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga Negara dalam mengatur kesejahteraan rakyat sebagai bagian penting suatu bangsa. Namun, realitas terjadi, perempuan masih tersekat dengan tidak adanya ruang aktualisasi politiknya.

1. Partisipasi politik perempuan

Secara komulatif mengatakan perjuangan hak 30% adalah perjuangan perempuan tidak sepenuhnya benar karena ada partai politik yang memiliki kewajiban dan juga tanggung jawab sama besarnya dalam mewujudkan kuota 30% itu. Memang, persoalan dapat tercapai atau tidak tergantung dari perempuan itu sendiri, akan tetapi harus ada pendampingan yaitu dari partai politik karena perempuan politik saat ini masih didominasi oleh partai, belum independen sebagai perempuan politik. Politisi perempuan diharapkan bereperan aktif dan berkerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan kegiatan lainnya yang

dapat mendukung untuk memperjuangkan hak politik perempuan. Untuk itu, selain peran aktif perempuan perlu adanya dukungan partai politik. Karena tidak dapat dipungkiri jika partai politik memiliki signifikansi tercapainya kuota 30%. Sudah menjadi kewajiban partai politik berkomitmen tinggi dalam melakukan perekrutan yang baik, berdasarkan kualitas sumber daya manusia (perempuan) sehingga tercapai penempatan jumlah calon anggota parlemen perempuan yang cukup signifikan.

Harapan tersebut hanya mungkin tercapai jika kerja sama antara perempuan politik dan juga partai politik terjalin secara harmonis, tugas keduanya untuk meningkatkan partisipasi politik. Melihat peran penting partai politik dan memberikan ruang politik terhadap perempuan, seharusnya partai politik memberikan kesempatan maksimal terhadap kaum perempuan untuk berkecimpung dalam wilayah politik sehingga terjadi transformasi perubahan kualitas perempuan-perempuan yang bernaung dalam partai politik. Artinya, tidak saja memperlakukan perempuan sebagai pemanfaatan fotogather, namun lebih kepada upaya peningkatan partisipasi kaum perempuan dalam politik. Terjadi kesinambungan antara memanfaatkan perempuan sebagai mesin pendulang suara bermanfaat bagi partai dan juga konstituante/pemilih. Disisi lainnya, partai politik berperan sebagai pilar penting dalam wilayah demokrasi sehingga mengharuskan untuk meningkatkan daya kualitas sebagai fungsi pendidikan rekrutmen serta sosialisasi politik.

Kondisi demikian memungkinkan untuk memberikan kesempatan kepada kaum perempuan agar terlibat dalam politik praktis dengan memberikan tanggung jawab di posisi-posisi strategis. Posisi-posisi strategis yang dimaksud adalah posisi-posisi yang berada pada wilayah pembuatan kebijakan, dengan kesempatan tersebut, perempuan politik menjadi bagian dari tanggung jawab kebijakan yang diputuskan, agar perempuan memiliki kesempatan yang sama dan kontribusi yang signifikan seperti halnya laki-laki politik. Ketika perempuan politik harus bermuara pada partai politik, pada akhirnya keterwakilan kaum perempuan dalam politik akan menjadi jalur yang lurus searah dengan komitmen partai politik. Secara sederhana, perempuan politik kembali kepada kesungguhan awal suatu partai politik dan para elit partai.

Penekanan pada konsekuensi yang dapat diambil adalah berapa pun persentase keterwakilan perempuan dalam politik akan melewati pertimbangan rasional dan strategis, semisal dedikasi kemampuan (*capable*), terpercayanya kader (*credible*) untuk suatu persaingan politik dan juga pengukuran kadar kontribusi dalam politik praktis secara signifikan, selain itu perempuan politik menjadi lebih tegas dalam menentukan massa pendukung karena adanya pendukung partai yang sama. Prioritas pentingnya adalah penyamaan tujuan politik harus sesuai dengan tujuan partai. Hal demikian adalah tantangan tersendiri bagi perempuan, akan tetapi dalam kondisi terikat tidak memastikan perempuan tersekat, perempuan tetap dapat berjuang demi

kemaslahatan terlepas mendapat restu dari partai atau tidak, persoalannya perempuan politik harus lebih keras ketika tidak memiliki dukungan dari partai politik.

2. Kriteria kuota 30% perempuan dalam anggota legislatif

Indonesia bukan lagi berada pada masa saat Kartini terpasung haknya, bukan lagi masa pingit dan pembatasan hak-hak bagi perempuan. Setidaknya, kaum perempuan yang selama ini mendapatkan mindset sebagai pihak kedua bisa bernafas lega. Pasalnya, pemerintah bersama DPR telah melakukan tindakan reformasi dalam bidang politik. Kondisi yang demikian terbukti dengan hadirnya beberapa paket naskah undang-undang tentang politik Yang membawa harapan besar bagi upaya memaksimalkan pemberdayaan perempuan Indonesia. Serta tertuang secara legitim pada reformasi undang-undang politik tersebut dalam UU Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan umum, di dalam nya mengtaur tentang kewajiban parpol menyertakan 30% keterwakilan perempuan sebagai pengurus partai sebagaimana tertuang pada Pasal 15 huruf “d”.³⁵

Partai politik diharapkan mampu meningkatkan partisipasi perempuan dalam berpolitik dengan cara memberikan kesempatan untuk dapat terjun dalam bidang politik dan meningkatkan kualitas serata memberikan pendidikan politik kepada perempuan yang ada di partai politik. Menilik kondisi itu, sudah

³⁵Undang-Undang Ri Nomor 10 Tahun 2008. Tentang Pemilu. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). h. 13.

sepatutnya porsi kuota 30% menjadi acuan penting kebijakan kesetaraan gender dan saat yang tepat untuk segera di implementasikan oleh para pemimpin partai politik dalam penentuan dan pengajuan legislative candidate (kader potensial). Berdasarkan Undang-Undang Pemilihan umum No. 10 Tahun 2008 bahwa partai politik di Indonesia diwajibkan memberikan kuota 30% untuk mengisi struktur kepengurusan partai dan juga sebagai kader yang akan masuk dalam bursa calon anggota legislatif. Dengan demikian, selalu ada satu nama perempuan diantara tiga nama laki-laki. Perbincangan di atas pada dasarnya merupakan tantangan yang diemban sendiri oleh kaum perempuan.

kaum perempuan di beri ruang untuk melakukan terobosan baru dalam hal lobi-lobi politisi laki-laki yang di elitis sekaligus pihak yang mendominasi, ambil sample sebagai contoh sederhana dalam pencalonan untuk anggota legislatif dan juga pada saat penentuan nomor urut calon, perbincangan sebisamungkin terlepas dari pertimbangan dan keputusan akan suara terbanyak dalam pemilu mendatang. Hal lain yang perlu dipertimbangan adalah budaya politik partai politik yang masih condong sentralistis dan patriarkis yang membuat calon legislatif perempuan tidak berkesempatan mendapatkan di nomor jadi dan dinominasikan hanya sebagai formalitas tanpa kematangan mekanisme pendidikan rekrutmen politik yang memadai demi memenuhi kuota 30% yang di amanatkan oleh undang-undang.

E. *Fiqh Siyasah*

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Fiqh Siyasah berasal dari dua kata yaitu kata *fiqh* dan yang kedua yaitu *Al - Siyasi*. Kata *fiqh* secara bahasa adalah faham, sedangkan kata *Al - Siyasi* yang artinya adalah mengatur. Kata *fiqh* berasal dari *faqaha - yafqahu - fiqhan*. Secara bahasa pengertian *fiqh* adalah paham yang mendalam.³⁶ Kata, *faqaha* di ungkapkan dalam Al-Quran sebanyak 20 kali, 19 kali di antaranya di gunakan untuk pengertian, kedalaman ilmu yang dapat di ambil manfaat darinya. Berbeda dengan ilmu yang sudah di bentuk pasti (*qath'i*), *fiqh* merupakan, ilmu tentang hukum yang tidak pasti (*zhanni*). Menurut istilah *fiqh* adalah Ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalil yang rinci (*tafsili*).³⁷ Jadi *fiqh* menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum islam yang bersumber dari Al-quran dan Sunnah yang di susun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad.

Berkenaan dengan luasnya objek kajian *fiqh siyasah*, maka dalam tahap perkembangan *fiqh siyasah* ini, di kenal beberapa pembedaan *fiqh siyasah* ke dalam delapan bidang, yaitu:

a. *Siyasah Dusturriyah*

Siyasah dusturiyah merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep *konstitusi* (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), *legislasi* (bagaimana cara perumusan undang-

³⁶Amir Syarifuddin, *Pembaruan Pemikiran Dalam Islam* (Padang : Angkasa Raya, 1990), h. 15.

undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.³⁸

b. *Siyasah Tasyri'iyah*

Legislasi atau kekuasaan legislative disebut juga dengan *al-sulthah al-tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Dalam konteks ini kekuasaan legislative (*al-sulthah al-tasyri'iyah*) berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syari'at Islam.

c. *Siyasah Qadha'iyah*

System kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan. Dan dalam konsep *Fiqh Siyasah*, kekuasaan yudikatif ini biasa disebut sebagai *Sulthah Qadhaiyyah*. Kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara perbantahan dan permusuhan, pidana dan penganiayaan, mengambil hak dari orang durjana dan mengembalikannya kepada yang punya, mengawasi harta wakaf dan persoalan-persoalan lain yang diperkarakan di pengadilan. Sedangkan tujuan kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan serta tujuan menguatkan negara dan menstabilkan kedudukan hukum kepala Negara.³⁹

d. *Siyasah Maliyah*

Sebagai salah satu cabang ilmu lahir dari *fiqh*, *siyasah Maliyah* memiliki akar yang sama dengan induknya, yaitu al-quran dan al-hadits. Al-Quran dan Al-Hadist di posisikan sebagai sumber doktrin yang

³⁸ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*....,h. 177

³⁹ Hakim Javid Iqbal, *Masalah-masalah Teori Politik Islam*....,h. 65

aksiomatis, artinya kebenaran-kebenaran yang di yakini, bukan pertanyaan-pertanyaan ilmiah. *Aksioma* ini melahirkan berbagai penafsiran yang menjadi pengetahuan Normative yang berbentuk *fiqh*. Dari ilmu *fiqh siyasah*. Secara spesifik dari *fiqh siyasah* lahirlah *siyasah Maliyah*. *Siyasah Maliyah* memiliki dua bidang kajian, yaitu tentang kebijakan pengelolaan keuangan dan pengelolaan sumber daya alam.

e. *Siyasah idariyah*

Siyasah idariyah merupakan bagian dari *siyasah syari'ah*, pada zaman nabi administrasi Negara (*siyasah idariyah*) di atur langsung oleh Nabi Muhammad SAW karena pada zamannya, Nabi sebagai kepala pemerintahan dan kepala Negara dengan di angkatnya Zaid Ibn Tsabit sebagai sekretaris Negara untuk mencatat berbagai perihal ketatanegaraan. Kemudian setelah Nabi Muhammad SAW wafat di angkatlah Abu Bakar Ash Sidiq sebagai kepala Negara dan Abu Bakar juga telah mengangkat beberapa sahabat untuk ikut serta dalam mengelola ketatanegaraan Negara. Hal demikian terus di lakukan oleh para Khulafaurosyidin yang terakhir pada masa Ali Bin Abi Thalib. Dalam sejarahnya *siyasah idariyah* sudah di terapkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW, yang mana masih di pakai sampai sekarang bahkan dalam dunia yang modern.⁴⁰

f. *Siyasah Kharijiyah /Siyasah Dawliyah*

Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga Negara non-muslim (*al-siyasah al-duali al-'am*) atau di sebut juga dengan hubungan internasional.

g. *Siyasah Tanfiziyyah*

⁴⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*,.... h. 34.

Siyasah tanfidziyah adalah tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya Negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*). di sini Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah di rumuskan tersebut. Dalam hal ini Negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan Negara lain (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala Negara) di bantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang di bentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu Negara dengan Negara islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijakan legislative yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan nash dan kemaslahatan.⁴¹

h. *Siyasah Harbiyyah*

Siyasah Harbiyyah adalah pemerintah atau kepala Negara mengatur dan mengurus hal-hal dan masalah yang berkaitan dengan perang, perlakuan tawanan perang, harta rampasan perang dan masalah perdamaian.

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

Siyasah Dusturiyah adalah bagian yang membahas mengenai masalah perundang-undangan Negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara), legislasi

⁴¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*...., h. 158

(bagaimana cara perumusan Undang-Undang), lembaga demokrasi dan syura merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas mengenai konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintahan dan warga Negara serta hak-hak warga Negara wajib untuk dilindungi.⁴²

Secara istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara, baik yang tertulis (*Konvensi*) maupun tertulis (*Konstitusi*). Kata dustur juga sudah diserap kedalam bahasa Indonesia, yang salah artinya adalah Undang-Undang dasar suatu Negara. Menurut ‘Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang di letakkan islam dalam perumusan Undang-Undang Dasar ini adalah jaminan atas Hak Asasi Manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan statifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama. Oleh sebab itu kata, dustur sama dengan, constitution, dalam bahasa Inggris, atau dalam bahasa Indonesia adalah Undang-Undang Dasar. Kata, Dasar dalam bahasa Indonesia tersebut tidak menutup kemungkinan berasal dari kata, dustur. Dengan demikian siyasah dusturiyah adalah bagian dari fiqh siyasah yang membahas mengenai masalah perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat hukum islam. Prof. H. A. Dzajuli menyebutkan bahwasanya sumber fiqh dusturiyah ada lima yakni:

- a. Al-Quran al-Karim
- b. Hadist, terutama hadist-hadist yang berhubungan dengan imamah, dan kebijakan Rasulullah SAW dalam menerapkan hukum, namun yang bersifat

⁴² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*...., h. 177.

- teknis ada kemungkinan telah banyak berubah akibat kemajuan ilmu dan teknologi yang pesat.
- c. Kebijakan-kebijakan khulafa Al Rasyidin didalam mengendalikan pemerintahan, meskipun berbeda satu sama lain namun tujuannya sama yakni kemaslahatan rakyat.
 - d. Ijtihad para ulama seperti *Al Maqasid Al - Sittah* (6 tujuan hukum islam) yaitu, *hifdh al din* (memelihara agama), *hifdh al nafs* (memelihara jiwa), *hifdh al aal* (memelihara akal), *hifdh al mal* (memelihara harta), *hifdh al nash* (memelihara keturunan), *hifdh al ummah* (memelihara umat).
 - e. Adat istiadat suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan Hadist.

Adapun konsep lembaga perwakilan rakyat dalam fiqh siyasah dusturiyah di bagi menjadi tiga yakni *Imamah*, *wizarah*, *Ahl Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi*:

a. *Imamah*

imamah seringkali di hubungkan dengan *khalifah* atau *amir*. Istilah ini memberikan pengertian bahwa hal itu merupakan istilah kepemimpinan tertinggi dalam Islam. Ibnu Khaldun memberikan rumusan bahwa institusi imamah atau khalifah mempunyai tugas untuk mewujudkan kemaslahatan berdimensi ganda (dunia akhirat) serta kemampuan untuk menghindarkan umat dari kerusakan. Sementara Ibnu Taimiyah berpandangan bahwa *imamah* adalah sebuah lembaga yang menyuarakan nilai ketuhanan dan tujuan umum syariat serta penerus bagi misi kenabian agar tercapai kemaslahatan di dunia dan diakhirat bagi bangsa atau umat yang dipimpin. Dari beberapa batasan tersebut maka institusi *imamah* membutuhkan instrumen pendukung antara lain:

- 1) *Al-Siyasah* (system)
- 2) *Tasarruf* (kebijakan yang terstruktur)
- 3) *Mas'uliyah* (tanggungjawab)
- 4) *Ba'iah amah* (kepatuhan umat dalam hubungan saling membutuhkan)

Abdul Qadir Audah yang mendefinisikan bahwa imamah adalah kepemimpinan umum umat Islam dalam masalah-masalah keduniaan dan keagamaan untuk menggantikan Nabi Muhammad SAW dalam rangka menegakkan nilai keagamaan dan memelihara segala yang wajib dilaksanakan oleh umat islam.⁴³

b. *Wizarah*

Wizarah merupakan aspek penting dalam struktur pemerintah islam yang membantu menyelesaikan tugas kepala Negara. Orang yang bertugas untuk melaksanakan tugas-tugas kenegaraan itu di sebut wazir. Dalam perjalanan sejarah islam ketika Nabi Muhammad SAW menjadi kepala Negara maka orang-orang yang bertugas membantu tugas kenegaraan itu adalah para sahabat senior seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Praktek dan sistem semacam ini berlanjut pada masa Bani Abbasiyah dan Bani Umayyah. Di masa ini para wazir mempunyai peran sebagai kepanjangan tangan khalifah. Oleh karenanya seorang wazir punya wewenang untuk mengkoordinir departemen *diwan* departemen pertahanan *diwan al-jaisy*, departemen perpajakan *diwan al-kh arj*, dan departemen keuangan *diwan bait al-mal*. Al-Mawardi dalam bukunya *Al-Ahk Mal-Sultaniyyah* membagi wazir kedalam dua bentuk. *Pertama*, *wazir tafwid* yaitu *wazir* yang

⁴³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*...., h. 130.

memiliki kekuasaan luas memutuskan berbagai kebijaksanaan kenegaraan. Ia juga merupakan kordinator kepala-kepala departemen. *Wazir* ini bisa di katakan seperti perdana menteri. Karena besarnya kekuasaan *wazir tafwid* ini, maka orang yang menduduki jabatan ini merupakan orang-orang kepercayaan khalifah. *Kedua, Wazir Tanfidh* yaitu wazir yang hanya bertugas sebagai pelaksana terhadap kebijaksanaan yang di gariskan oleh *wazir tafwid*. Ia tidak punya wewenang untuk menentukan kebijaksanaannya sendiri.

c. *Ahl Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi*

Al-Mawardi menyebutkan *ahl, Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi* dengan *Al Ikhtiyar* , karena merekalah yang berhak memilih khalifah. Adapun Ibn Taimiyah menyebutkan dengan *ahlul - syawahid*. Sebagian lagi menyebutkan *Ahl Al-Syura* atau *Al-Ijma* sementara *Al-Baghdadi* menamakan mereka dengan *Al-Ijtihad*. Namun semuanya mengacu pada pengertian, sekelompok anggota masyarakat yang mewakili umat (rakyat) dalam menentukan arah dan kebijaksanaan pemerintahan demi tercapainya kemaslahatan hidup mereka'. Keberadaan *Ahl Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi* ini mempunyai tugas dan wewenang di antaranya adalah bermusyawarah dalam perkara umum kenegaraan, mengeluarkan Undang-Undang yang berkaitan dengan kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan dasar-dasar syariat islam terutama Al-Quran dan Hadist serta sunnah dan melaksanakan peran konstitusional dalam memilih pemimpin tertinggi dalam hal ini Imamah atau Khalifah. Dalam konteks saat ini keberadaan *Ahl Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi* dapat di katakan sama dengan badan *legislative* karena dapat di lihat dari persamaan tugas dan wewenang yang di

miliki yaitu sama-sama membuat peraturan perundang-undangan untuk kemaslahatan umat.

Adapun dalam penelitian ini pembahasan mengenai fiqh siyasah dusturiyah yang akan kita fokuskan adalah tentang *Ahlu Al-Halli Wa Al-'Aqdi* yang dapat di artikan sebagai orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat, tentunya hal ini berkaitan dengan penelitian skripsi yang akan di bahas.

Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi dapat di artikan dengan ,orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat'. Dengan kata lain, *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi* juga disebut oleh Al-Mawardi sebagai *ahl al - ikhtiyar* (golongan yang berhak memilih).⁴⁴ Istilah yang lebih populer di pakai pada awal pemerintahan islam tentang hal ini adalah *Ahl Al- Shura*, semuanya mengacu pada pengertian, sekelompok anggota masyarakat yang mewakili umat dalam menentukan arah dan kebijaksanaan pemerintahan demi tercapainya kemaslahatan hidup mereka. Sedangkan Ibnu Taimiyah menyebutnya dengan *Al-Shawqah* .⁴⁵ Ibnu Taimiyah mengembangkan konsep *Al-Shawqah* dalam teori poltiknya. Menurutnya, *Ahl Al-Shawqah* adalah orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi dan mempunyai kedudukan terhormat di masyarakat. Mereka menjadi semacam tempat untuk bertanya bagi masyarakat dan ucapan mereka menjadi, kata putus bagi masyarakat tersebut.

⁴⁴ Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*...., h. 66-67.

⁴⁵ Muhammad iqbal, *fikih siyasah*...., h. 139-140.

Secara substansional mayoritas ulama mempunyai pemahaman yang sama tentang definisi dari *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi*, di antara yaitu:

- 1) Sekelompok orang memilih imam atau kepala Negara. Istilah lain dari Ahlu al - Halli wa al - 'Aqdi adalah Ahl al - ijtihad dan ahl al - khiyar.
- 2) Orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat. Istilah ini dirumuskan oleh ulama fiqh untuk sebutan bagi orang-orang yang berhak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani rakyat.
- 3) Orang-orang yang mampu menemukan penyelesaian terhadap masalah-masalah yang muncul dengan memakai metode ijtihad. Orang berpengalaman dengan urusan masyarakat, yang melaksanakan kepemimpinan sebagai kepala keluarga, suku atau golongan.
- 4) *Ahlu al - Halli wa al - 'Aqdi* adalah para ulama, para kepala, para pemuka masyarakat sebagai unsur-unsur masyarakat yang berusaha mewujudkan kemaslahatan masyarakat.
- 5) Kumpulan orang dari berbagai profesi dan keahlian yang ada dalam masyarakat, yaitu para amir , hakim, ulama, militer dan semua penguasa dan pemimpin yang dijadikan rujukan oleh umat dalam masalah kebutuhan dan kemaslahatan publik.

Berdasarkan definisi tokoh di atas dapat disimpulkan bahwa *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi* adalah sebuah lembaga perwakilan yang menampung dan

meyalurkan aspirasi atau suara masyarakat yang terdiri dari berbagai kalangan dan profesi.

Adapun tugas *Ahl Ahlu al - Halli wa al - 'Aqdi* sebagai berikut yaitu:

- 1) Memilih dan membaiat pemimpin.
- 2) Mengarahkan kehidupan masyarakat kepada maslahat
- 3) Membuat Undang-Undang yang mengikat seluruh umat didalam halhal yang tidak diatur secara tegas oleh Al-Quran dan Hadist.
- 4) Mengawasi jalannya pemerintahan.⁴⁶

Tugas *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi* juga bermusyawarah dalam perkara-perkara umum kenegaraan, mengeluarkan Undang-Undang yang berkaitan dengan kemaslahatan umat dan tidak bertabrakan dengan suatu dasar dari dasar-dasar syariat islam yang baku dan melaksanakan peran konstitusional dalam memilih pemimpin.

Setiap lembaga pasti mempunyai wewenang yang seharus di pergunakan dengan baik oleh lembaga tersebut, begitu juga dengan *Ahl Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi* sebagai berikut:

- 1) Pemegang kekuasaan tertinggi yang mempunyai wewenang untuk memilih dan membaiat imam.
- 2) Mengarahkan kehidupan masyarakat kepada maslahat.
- 3) Membuat UndangUndang yang mengikat kepada seluruh umat didalam hal-hal yang

⁴⁶ Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah....*, h. 71.

tidak diatur tegas didalam Al-Quran dan Hadist.

- 4) Tempat konsultasi imam didalam menentukan kebijakan.
- 5) Mengawasi jalannya pemerintahan.

Adapun dalil yang paling jelas bahwa Islam mengakui prinsip persamaan antara perempuan dengan laki-laki dalam hak-hak politik, yang di antaranya hak dalam memilih dan hak untuk di pilih sebagai anggota legislatif:

Firman Allah SWT dalam surat at-Taubah
(9) ayat 71:



“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain, mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan di beri rahmat oleh

*Allah, Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*⁴⁷

Ayat ini secara umum di pahami sebagai gambaran tentang adanya kewajiban melakukan kerjasama antara laki-laki dan perempuan di dalam berbagai bidang kehidupan untuk melaksanakan *amar ma''ruf nahi munkar*. Pengertian *amar ma''ruf* mencakup segala segi kebaikan atau perbaikan kehidupan, termasuk memberi nasehat atau kritik kepada penguasa.

Islam mengangkat derajat manusia dan memberikan kepercayaan yang tinggi untuk menjadi khalifah di bumi tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, karena setiap manusia secara fungsional dan sosial adalah pemimpin yang sebagaimana termaktub dalam surat al-An'am ayat 165:



"Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikanNya kepadamu. Sesungguhnya

⁴⁷ Yayasan bina'muwahhidin. Al-quran dan terjemah..., h. 199.

*Tuhanmu amat cepat siksaanNya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*⁴⁸

Laki-laki dan perempuan mempunyai fungsi yang sama sebagai khalifah yang akan mempertanggungjawabkan tugas-tugas kekhalifahannya di bumi, sebagaimana mereka harus bertanggung jawab sebagai hamba Tuhan. Dalam bidang kepemimpinan, kita bertolak pada status manusia sebagai khalifah. Tugas khalifah di muka bumi adalah sebagai pengemban amanat Allah untuk mengolah, memelihara dan mengembangkan bumi. Inilah tugas pokok manusia, tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan.



⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro 2001), h. 119.

DAFTAR RUJUKAN

Sumber Buku

- Abdul, Farid Khaliq. *Fikih Politik Islam*. Jakarta: Amzah, 2005.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafik Grafika, 2011.
- Anugrah, Astrid, *Keterwakilan Perempuan Dalam Politik*, Jakarta: Pancuran Alam, Jakarta, 2009
- Ashshofa, Burhan. *Metode penelitian Hukum*. Jakarta: Pt.Rineka Cipta, 2013.
- Ashiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Dan Pilar Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Azwar, Saiffudin. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Badrun, Ubedilah. *System Politik Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2017.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2001.
- Djazuli H.A, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah, Jakarta: Kencana, 2003.

Gianto, *Pendidikan Filsafat Pancasila Dan Kewarganegaraan*. Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.

Huda, Ni'matul. *Negara Hukum, Demokrasi, Dan Judicial Review*. Yogyakarta: Raja Wali Press, 2005.

Javid, Hakim Iqbal. *Masalah-masalah Teori Politik Islam*. Bandung : Mizan, 1996.

Iqbal, Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: kencana, 2014.

Ija, Suntana. *Politik Hukum Islam*. Bandung: Cv Pustaka Setia, 2014.

Karsayuda, Rifqinizamy. *Partai Politik Local Untuk Indonesia*. Depok: Pt Raja Grafindo Persada, 2015.

Kencana, inu, Syafiie. *Ilmu Politik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.

Narbuko, Cholid. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Mahfud, M.D, *Hukum Dan Politik Di Indonesia*. Jakarta: LP3es Indonesia, 1990.

Mahfud M. D, *Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gema Media, 1999.

Marijan, Kacung. *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Marzuki, Suparman. *Politik Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Erlangga, 2014.

Poerwantana. *Partai Politik Di Indonesia*. Jakarta: Pt Rineka Cipta, 1994.

Pulungan, Suyuthi. *Fikih Siyasa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*. Jakarta : Gema Insani, 2004.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Alfabeta, 2013.

Susiadi. *Metode Penelitian*. Bandar Lampung: Fakultas Syariah Iain Raden Intan Lampung, 2014.

Suswantoro, Gunawan. *Pengawasan Pemilu Partisipatif*. Jakarta: Erlangga, 2015.

Syarifuddin, Amir. *Pembaruan Pemikiran Dalam Islam* Padang: Angkasa Raya, 1990.

Ubaedillah, *Pancasila Dan Demokrasi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Yayasan Bina Muwahhidin. *Al-Quran Dan Terjemahan*. Bekasi: Sukses Publishing, 2012.

Jurnal/Online:

Ratnawati, "Potret Kuota Perempuan Di Parlemen". *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, Vol. 7 No. 3 Maret, 2004.

Raqim Ukhty, "Implementasi Ketentuan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Di DPRD Kota Salatiga", *Jurusan Politik Dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang*, 2017.

Endah Prabasini, *Pelaksanaan Pemenuhan Kuota 30% Perempuan Dalam Pemilihan Umum Dewan*

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2010.

Meri Kurniati, Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Ketentuan 30% Kuota Keterwakilan Perempuan Dalam Anggota Dprd, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

[Http://Www.Beritasatu.Com/Nasional/](http://www.Beritasatu.Com/Nasional/). Di akses Pada Hari Rabu, 11 Desember 2020 Pukul 09:35.

[Https://Www.Kpu.Go.Id/Index.Php/Post/Read](https://www.Kpu.Go.Id/Index.Php/Post/Read). Di akses Pada Hari Jumat, 13 Desember 2020 Pukul 10:45.

[Https://Www.Puskapol.Ui.Ac.Id/Data-Dprd-Provinsi-Terpilih-2019-Lampung](https://www.Puskapol.Ui.Ac.Id/Data-Dprd-Provinsi-Terpilih-2019-Lampung), Di Akses Pada Hari Rabu, 17 Februari 2021 Pukul 07:42.

Sk Kpu Kota Bandar Lampung Nomor : 525/Hk.03.1-Kpt/1871/Kpu-Kot/Vii/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Di akses Pada Hari Kamis, 18 Februari 2021, Pukul 07:32

Peraturan Perundangan:

Undang-Undang Ri Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Undang-Undang 1945 Dan Amandemen Terlengkap. Jakarta Timur: Anugerah, 2016.

Wawancara:

Hasil Wawancara Dengan Dra. Suprihatin, Tanggal 5 Januari 2021.

Hasil Wawancara Dengan Tuyono, S.H., Tanggal 5 Januari 2021.

Hasil Wawancara Dengan Badarrudin Amir, S.H. Tanggal
5 Januari 2021.

Hasil Wawancara Dengan Risma Mauli AZ., S.E., M.IP.,
Tanggal 6 Januari 2021.

